



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - b. bahwa rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum dan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
  - c. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1260/XII/2019, Tanggal 23 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
32. Peraturan....

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah..... Rp. 1.359.964.337.393,00

2. Belanja ...

2. Belanja Daerah.....	Rp. 1.498.029.989.393,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (138.065.652.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan.....	Rp. 138.065.652.000,00
b. Pengeluaran.....	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 138.065.652.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	Rp 0,00

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah .....                  | Rp. 116.376.412.356,00 |
| b. Dana Perimbangan .....                        | Rp. 911.129.326.100,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan<br>Daerah Yang Sah ..... | Rp. 332.458.598.937,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Pajak Daerah .....   | Rp. 34.321.525.744,00 |
| b. Retribusi Daerah .....                                     | Rp. 4.671.117.971,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah<br>Yang Dipisahkan ..... | Rp. 1.651.113.295,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli<br>Daerah Yang Sah.....          | Rp. 75.732.655.346,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil .....     | Rp. 198.896.963.100,00 |
| b. Dana Alokasi Umum .....   | Rp. 712.232.363.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus ..... | Rp. 0,00               |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Hibah .....  | Rp. 59.355.600.000,00  |
| b. Dana Darurat .....   | Rp. 0,00               |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan<br>Pemerintah Daerah Lainnya ..... | Rp. 99.718.763.937,00  |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi<br>Khusus.....                                | Rp. 173.384.235.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi<br>atau dari Pemerintah Daerah Lainnya      | Rp. 0,00               |
| f. Lain - lain Penerimaan yang sah.....                                       | Rp. 0,00               |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung. .... | Rp. 938.941.307.261,75 |
| b. Belanja Langsung.....        | Rp. 559.088.682.131,25 |

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai.....           | Rp. 637.704.284.554,75 |
| b. Belanja Bunga.....             | Rp. 0,00               |
| c. Belanja Subsidi .....          | Rp. 0,00               |
| d. Belanja Hibah .....            | Rp. 44.547.999.159,00  |
| e. Belanja Bantuan Sosial .....   | Rp. 250.000.000,00     |
| f. Belanja Bagi Hasil .....       | Rp. 4.380.147.513,00   |
| g. Belanja Bantuan Keuangan ..... | Rp. 251.558.876.035,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga .....    | Rp. 500.000.000,00     |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai .....         | Rp. 23.050.808.123,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa ..... | Rp. 388.289.454.370,85 |
| c. Belanja Modal .....           | Rp. 147.748.419.637,40 |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| a. Penerimaan .....  | Rp. 138.065.652.000,00 |
| b. Pengeluaran ..... | Rp. 0,00               |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) ..... | Rp. 138.065.652.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan .....   | Rp. 0,00               |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....                    | Rp. 0,00               |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah .....  | Rp. 0,00               |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.....                              | Rp. 0,00               |
| f. Penerimaan Piutang Daerah .....   | Rp. 0,00               |
| g. Penerimaan kembali investasi dana Bergulir.....                         | Rp. 0,00               |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |          |
|---|----------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan .....                      | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ..... | Rp. 0,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang .....                         | Rp. 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah .....                      | Rp. 0,00 |

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan ...

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; dan / atau
  - d. memiliki dampak signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ;
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Masyarakat;
  - c. program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan.
- (4) Untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Program dan Kegiatan yang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Persetujuan Pimpinan DPRD sambil menunggu Perubahan Perda tentang APBD.
- (5) Dalam hal Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi setelah Rancangan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran.

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran ...



7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

**Pasal 7**

Bupati Indragiri Hulu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dy</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 31 Desember 2019

*B* **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

*H* **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

**H.HENDRIZAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 10

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU:

(6.118.A/2019)

*Handwritten mark*

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**RINGKASAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH(Rp.)
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,359,964,337,393.00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>116,376,412,356.00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	34,321,525,744.00
1.1.2	Retribusi Daerah	4,671,117,971.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,651,113,295.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75,732,655,346.00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>911,129,326,100.00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	198,896,963,100.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	712,232,363,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>332,458,598,937.00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	59,355,600,000.00
1.3.2	Dana Darurat	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	99,718,763,937.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173,384,235,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
1.3.6	Lain-lain Penerimaan yang Sah	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,359,964,337,393.00</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,498,029,989,393.00</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>938,941,307,261.75</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	637,704,284,554.75
2.1.2	Belanja Bunga	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	44,547,999,159.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	250,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4,380,147,513.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	251,558,876,035.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>559,088,682,131.25</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	23,050,808,123.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	388,289,454,370.85
2.2.3	Belanja Modal	147,748,419,637.40
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,498,029,989,393.00</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(138.065.652.000,00)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH(Rp.)
1	2	3
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>138,065,652,000.00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138,065,652,000.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00
3.1.7	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	0.00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>138,065,652,000.00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0.00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>138.065.652.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan(SILPA)</b>	<b>0,00</b>

 **BUPATI INDRAGIRI HULU**

  
H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>69,470,664,996.00</b>	<b>394,951,311,692.52</b>	<b>341,770,051,791.04</b>	<b>736,721,363,483.56</b>
<b>2.01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>0.00</b>	<b>257,907,128,485.92</b>	<b>109,847,615,640.60</b>	<b>367,754,744,126.52</b>
2.01.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	257,907,128,485.92	109,847,615,640.60	367,754,744,126.52
<b>2.02</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>68,210,664,996.00</b>	<b>101,383,812,953.13</b>	<b>121,644,159,693.95</b>	<b>223,027,972,647.08</b>
2.02.01.00	Dinas Kesehatan	23,064,112,482.00	78,767,262,168.94	62,680,987,235.95	141,448,249,404.89
2.02.02.00	RSUD Indrasari Rengat	45,146,552,514.00	22,616,550,784.19	58,963,172,458.00	81,579,723,242.19
<b>2.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1,250,000,000.00</b>	<b>9,993,704,934.40</b>	<b>79,000,310,271.14</b>	<b>88,994,015,205.54</b>
2.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,250,000,000.00	9,993,704,934.40	79,000,310,271.14	88,994,015,205.54
<b>2.04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,988,855.89</b>	<b>3,893,976,340.00</b>	<b>8,249,965,195.89</b>
2.04.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0.00	4,355,988,855.89	3,893,976,340.00	8,249,965,195.89
<b>2.05</b>	<b>KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>17,164,733,341.97</b>	<b>23,528,300,352.01</b>	<b>40,693,033,693.98</b>
2.05.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	4,932,815,117.75	2,534,964,364.38	7,467,779,482.13
2.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	8,031,983,464.88	15,277,126,946.65	23,309,110,411.53
2.05.03.00	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	10,000,000.00	4,199,934,759.34	5,716,209,040.98	9,916,143,800.32
<b>2.06</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145,943,121.21</b>	<b>3,855,689,493.34</b>	<b>8,001,632,614.55</b>
2.06.01.00	Dinas Sosial	0.00	4,145,943,121.21	3,855,689,493.34	8,001,632,614.55
<b>3</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>1,588,765,000.00</b>	<b>60,815,912,769.28</b>	<b>63,739,388,489.85</b>	<b>124,555,301,259.13</b>
<b>3.01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,231,631,977.23</b>	<b>2,161,083,555.37</b>	<b>8,392,715,532.60</b>
3.01.01.00	Dinas Tenaga Kerja	0.00	6,231,631,977.23	2,161,083,555.37	8,392,715,532.60
<b>3.02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098,557,043.80</b>	<b>2,603,809,879.99</b>	<b>6,702,366,923.79</b>
3.02.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00	4,098,557,043.80	2,603,809,879.99	6,702,366,923.79
<b>3.03</b>	<b>PANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,321,612,839.10</b>	<b>2,682,942,634.96</b>	<b>7,004,555,474.06</b>
3.03.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	4,321,612,839.10	2,682,942,634.96	7,004,555,474.06
<b>3.05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>377,565,000.00</b>	<b>4,824,899,593.18</b>	<b>6,480,125,451.58</b>	<b>11,305,025,044.76</b>
3.05.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	377,565,000.00	4,824,899,593.18	6,480,125,451.58	11,305,025,044.76
<b>3.06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,602,947,507.97</b>	<b>2,086,268,278.39</b>	<b>6,689,215,786.36</b>
3.06.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	4,602,947,507.97	2,086,268,278.39	6,689,215,786.36
<b>3.07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,890,649,863.42</b>	<b>7,239,815,295.37</b>	<b>12,130,465,158.79</b>
3.07.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.00	4,890,649,863.42	7,239,815,295.37	12,130,465,158.79
<b>3.08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,246,450,925.62</b>	<b>1,929,919,369.00</b>	<b>6,176,370,294.62</b>
3.08.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	4,246,450,925.62	1,929,919,369.00	6,176,370,294.62
<b>3.09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>1,161,200,000.00</b>	<b>5,576,598,644.92</b>	<b>15,334,080,378.25</b>	<b>20,910,679,023.17</b>
3.09.01.00	Dinas Perhubungan	1,161,200,000.00	5,576,598,644.92	15,334,080,378.25	20,910,679,023.17

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
<b>3.10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,764,051,462.38</b>	<b>6,575,885,420.19</b>	<b>11,339,936,882.57</b>
3.10.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	4,764,051,462.38	6,575,885,420.19	11,339,936,882.57
<b>3.11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>0.00</b>	<b>3,965,447,654.04</b>	<b>2,033,061,160.00</b>	<b>5,998,508,814.04</b>
3.11.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.00	3,965,447,654.04	2,033,061,160.00	5,998,508,814.04
<b>3.12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,098,247,247.48</b>	<b>2,013,227,466.00</b>	<b>7,111,474,713.48</b>
3.12.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	5,098,247,247.48	2,013,227,466.00	7,111,474,713.48
<b>3.13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>4,230,798,644.83</b>	<b>10,476,327,684.75</b>	<b>14,707,126,329.58</b>
3.13.01.00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	50,000,000.00	4,230,798,644.83	10,476,327,684.75	14,707,126,329.58
<b>3.17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,094,040,049.31</b>	<b>2,122,841,916.00</b>	<b>6,216,881,965.31</b>
3.17.01.00	Dinas Perpustakaan	0.00	4,094,040,049.31	2,122,841,916.00	6,216,881,965.31
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>1,440,495,373.00</b>	<b>30,452,851,790.50</b>	<b>17,243,934,193.67</b>	<b>47,696,785,984.17</b>
<b>4.03</b>	<b>PERTANIAN</b>	<b>260,314,873.00</b>	<b>23,245,551,613.03</b>	<b>11,958,180,987.11</b>	<b>35,203,732,600.14</b>
4.03.01.00	Dinas Pertanian Dan Perikanan	260,314,873.00	23,245,551,613.03	11,958,180,987.11	35,203,732,600.14
<b>4.07</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>1,180,180,500.00</b>	<b>7,207,300,177.47</b>	<b>5,285,753,206.56</b>	<b>12,493,053,384.03</b>
4.07.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,180,180,500.00	7,207,300,177.47	5,285,753,206.56	12,493,053,384.03
<b>5</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN</b>	<b>1,287,464,412,024.00</b>	<b>453,041,111,480.68</b>	<b>136,335,307,656.69</b>	<b>589,376,419,137.37</b>
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>7,086,707,752.02</b>	<b>6,454,546,198.88</b>	<b>13,541,253,950.90</b>
5.01.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00	7,086,707,752.02	6,454,546,198.88	13,541,253,950.90
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>1,287,232,412,024.00</b>	<b>319,385,711,602.93</b>	<b>13,776,226,522.20</b>	<b>333,161,938,125.13</b>
5.02.01.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,152,810,135,230.00	308,642,180,100.44	7,622,747,458.95	316,264,927,559.39
5.02.02.00	Badan Pendapatan Daerah	134,422,276,794.00	10,743,531,502.49	6,153,479,063.25	16,897,010,565.74
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>0.00</b>	<b>8,909,882,643.37</b>	<b>7,995,634,574.56</b>	<b>16,905,517,217.93</b>
5.03.01.00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	0.00	8,909,882,643.37	7,995,634,574.56	16,905,517,217.93
<b>5.06</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG LAINNYA</b>	<b>232,000,000.00</b>	<b>117,658,809,482.36</b>	<b>108,108,900,361.05</b>	<b>225,767,709,843.41</b>
5.06.01.00	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.00	3,507,304,074.10	0.00	3,507,304,074.10
5.06.02.00	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	0.00	617,355,366.10	0.00	617,355,366.10
5.06.03.00	Sekretariat Daerah	232,000,000.00	27,754,531,272.03	45,970,728,341.18	73,725,259,613.21
5.06.04.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.00	26,857,400,945.79	21,576,100,063.11	48,433,501,008.90
5.06.05.00	Inspektorat	0.00	7,727,264,653.62	3,694,567,076.07	11,421,831,729.69
5.06.06.00	Kecamatan Rengat	0.00	11,281,719,610.00	8,786,796,908.00	20,068,516,518.00
5.06.07.00	Kecamatan Rengat Barat	0.00	5,043,190,743.30	2,552,878,184.00	7,596,068,927.30
5.06.08.00	Kecamatan Seberida	0.00	4,255,046,384.98	2,604,946,922.00	6,859,993,306.98
5.06.09.00	Kecamatan Batang Gansal	0.00	2,191,501,939.96	1,152,077,532.15	3,343,579,472.11
5.06.10.00	Kecamatan Batang Cenaku	0.00	2,929,064,771.11	1,164,904,799.90	4,093,969,571.01
5.06.11.00	Kecamatan Lirik	0.00	2,252,851,203.30	1,087,972,089.85	3,340,823,293.15
5.06.12.00	Kecamatan Pasir Penyu	0.00	6,234,195,999.83	7,482,377,237.39	13,716,573,237.22
5.06.13.00	Kecamatan Kelayang	0.00	2,918,869,481.43	2,472,067,946.00	5,390,937,427.43
5.06.14.00	Kecamatan Peranap	0.00	3,188,688,874.26	3,901,847,560.00	7,090,536,434.26
5.06.15.00	Kecamatan Kuala Cenaku	0.00	2,720,366,524.10	1,107,963,451.00	3,828,329,975.10
5.06.16.00	Kecamatan Sungai Lala	0.00	2,149,261,585.65	1,132,481,349.38	3,281,742,935.03
5.06.17.00	Kecamatan Rakit Kulim	0.00	2,350,402,518.69	1,120,998,460.46	3,471,400,979.15
5.06.18.00	Kecamatan Batang Peranap	0.00	1,746,196,273.81	1,156,889,782.56	2,903,086,056.37
5.06.19.00	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	0.00	1,933,597,260.30	1,143,302,658.00	3,076,899,918.30
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,359,964,337,393.00</b>	<b>938,941,307,261.75</b>	<b>559,088,682,131.25</b>	<b>1,498,029,989,393.00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				<b>(138,065,652,000.00)</b>

		PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
5.02	KEUANGAN	138,065,652,000.00	0.00	138,065,652,000.00	
5.02.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	138,065,652,000.00	0.00	138,065,652,000.00	

 BUPATI INDRAGIRI HULU

 H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSJD	

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 2.01 PENDIDIKAN  
 Organisasi : 2.01.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NOMOR REKENING				URAIAN				JUMLAH(Rp.)	DASAR HUKUM
1				2				3	4
2.01	2.01.01.00	00	01	4			0.00		
2.01	2.01.01.00	00	01	4	1		0.00		
2.01	2.01.01.00	00	01	4	1	4	0.00		
2.01	2.01.01.00	00	02				257,907,128,485.92	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke -17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	
2.01	2.01.01.00	00	02	5	1	1	257,907,128,485.92	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke -17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	
1.01	2.01.01.00	01					109,847,615,640.60		
1.01	2.01.01.00	01					2,969,355,971.87		
1.01	2.01.01.00	01	01				12,840,000.00		
1.01	2.01.01.00	01	01	5	2	2	12,840,000.00		
1.01	2.01.01.00	01	02				307,302,000.00		
1.01	2.01.01.00	01	02	5	2	2	307,302,000.00		
1.01	2.01.01.00	01	08				63,947,100.00		
1.01	2.01.01.00	01	08				63,947,100.00		
1.01	2.01.01.00	01	08	5	2	2	63,947,100.00		
1.01	2.01.01.00	01	10				263,259,540.00		

NOMOR REKENING		URAIAN		JUMLAH (Rp.)	DASAR HUKUM				
1		2		3	4				
2.05	5.06.19.00	16	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	180,654,800.00	
3.02	5.06.19.00	04					Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	45,227,550.00	
3.02	5.06.19.00	04	01				Pembinaan organisasi perempuan	45,227,550.00	
3.02	5.06.19.00	04	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	45,227,550.00	
3.12	5.06.19.00	02					Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	10,651,600.00	
3.12	5.06.19.00	02	10				Pelayanan Administrasi Terpadu	10,651,600.00	
3.12	5.06.19.00	02	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	10,651,600.00	
3.13	5.06.19.00	02					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	139,957,800.00	
3.13	5.06.19.00	02	01				Pembinaan Organisasi Kepemudaan	18,897,800.00	
3.13	5.06.19.00	02	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	18,897,800.00	
3.13	5.06.19.00	02	12				Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada HUT Kemerdekaan RI	121,060,000.00	
3.13	5.06.19.00	02	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	121,060,000.00	
5.01	5.06.19.00	04					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20,737,400.00	
5.01	5.06.19.00	04	17				Musrenbang Kecamatan	20,737,400.00	
5.01	5.06.19.00	04	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	20,737,400.00	
							JUMLAH BELANJA	3,076,899,918.30	
							Surplus / (Defisit)	(3,076,899,918.30)	
							JUMLAH PEMBIAYAAN MASUK	0.00	
							JUMLAH PEMBIAYAAN KELUAR	0.00	

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

BUPATI INDRAGIRI HULLU  
H. YUPI ARIANTO

H. YUPI ARIANTO

Peraturan Daerah Lampiran III Tahun 2020



**KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**  
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,**  
**PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran IV Peraturan Daerah  
 Nomor : 10 Tahun 2019  
 Tanggal : 5 Desember 2019

KODE	URAIAN URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH
1	Non Urusan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01	NON URUSAN	0.00	137,084,136,944.55	28,886,182,500.67	165,970,319,445.22
1.01.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00	123,499,652,287.58	1,687,019,190.25	125,186,671,477.83
1.01.2.01.01.00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	2,969,355,971.00	0.00	2,969,355,971.00
1.01.2.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	12,840,000.00	0.00	12,840,000.00
1.01.2.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	307,302,000.00	0.00	307,302,000.00
1.01.2.01.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	63,947,100.00	0.00	63,947,100.00
1.01.2.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	263,259,540.00	0.00	263,259,540.00
1.01.2.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	0.00	239,160,108.00	0.00	239,160,108.00
1.01.2.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0.00	83,697,500.00	0.00	83,697,500.00
1.01.2.01.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00	78,660,000.00	0.00	78,660,000.00
1.01.2.01.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00	155,505,000.00	0.00	155,505,000.00
1.01.2.01.01.00.01.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0.00	293,098,639.00	0.00	293,098,639.00
1.01.2.01.01.00.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	0.00	1,420,998,000.00	0.00	1,420,998,000.00
1.01.2.01.01.00.01.20	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0.00	50,888,084.00	0.00	50,888,084.00
1.01.2.02.01.00.01	Dinas Kesehatan	0.00	10,333,765,121.00	190,014,200.00	10,523,779,321.00
1.01.2.02.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	15,675,000.00	0.00	15,675,000.00
1.01.2.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	620,456,036.00	0.00	620,456,036.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH
5.06.5.06.03.00.13	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>707,472,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,472,956.00</b>
5.06.5.06.03.00.13.01	Penyeberhasilan Informasi dan Komunikasi	0.00	149,375,252.00	0.00	149,375,252.00
5.06.5.06.03.00.13.02	Penyusunan Naskah dan Dokumen Kehumasan	0.00	558,097,704.00	0.00	558,097,704.00
<b>5.06.00.00.14</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>15,764,371,666.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,764,371,666.54</b>
<b>5.06.5.06.04.00.14</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>15,764,371,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,764,371,665.00</b>
5.06.5.06.04.00.14.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	0.00	1,669,880,300.00	0.00	1,669,880,300.00
5.06.5.06.04.00.14.02	Hearing Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	0.00	52,892,000.00	0.00	52,892,000.00
5.06.5.06.04.00.14.03	Kegiatan Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	0.00	185,069,900.00	0.00	185,069,900.00
5.06.5.06.04.00.14.04	Rapat Rapat Paripurna	0.00	162,802,600.00	0.00	162,802,600.00
5.06.5.06.04.00.14.05	Kegiatan Reses	0.00	2,840,473,865.00	0.00	2,840,473,865.00
5.06.5.06.04.00.14.06	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD	0.00	377,890,100.00	0.00	377,890,100.00
5.06.5.06.04.00.14.07	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	0.00	10,209,922,300.00	0.00	10,209,922,300.00
5.06.5.06.04.00.14.09	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Fraksi	0.00	265,440,600.00	0.00	265,440,600.00
<b>5.06.00.00.17</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>0.00</b>	<b>149,271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,271,000.00</b>
<b>5.06.5.06.03.00.17</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>149,271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,271,000.00</b>
5.06.5.06.03.00.17.01	Rapat Koordinasi Potensi Unggulan Daerah	0.00	149,271,000.00	0.00	149,271,000.00

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YUPI ARIANTO**

<b>COORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
* BAGAG HUKUM	<i>dep</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/.....	
		KEPALA KANTOR/DIREKTUR BUDP.....	

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN**  
**KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM**  
**KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG										BELANJA LANGSUNG	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANSOS	BELANJA BAGI HASIL KE PROV KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	BELANJA BANTUAN KEU KE PROV KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Pelayanan Umum	160,662,180,285.37	0.00	0.00	44,547,999,159.00	250,000,000.00	4,380,147,513.00	251,558,876,035.00	500,000,000.00	0.00	121,145,031,992.07	23,889,003,000.81	
01 3	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,764,051,462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365,615,427.19	210,269,993.00	
01 3 17	PERPUSTAKAAN	4,094,040,049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,829,572.00	75,012,344.00	
01 5 01	PERENCANAAN	7,086,707,752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007,194,998.88	447,351,200.00	
01 5 02	KEUANGAN	18,148,688,895.93	0.00	0.00	44,547,999,159.00	250,000,000.00	4,380,147,513.00	251,558,876,035.00	500,000,000.00	0.00	12,541,169,791.95	1,235,056,730.25	
01 5 03	KEPEGAWAIAN	8,909,882,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894,357,574.56	101,277,000.00	
01 5 06	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA	117,658,809,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,288,864,627.49	21,820,035,733.56	
02	Pertahanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Ketertiban dan Keamanan	13,787,177,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465,001,311.03	347,090,000.00	
03 2 05	KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13,787,177,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465,001,311.03	347,090,000.00	
04	Ekonomi	58,653,523,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,795,915,706.50	5,912,228,977.12	
04 3 01	TENAGA KERJA	5,169,879,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,083,555.37	50,000,000.00	
04 3 03	PANGAN	4,053,321,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,902,294.96	109,040,340.00	
04 3 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,272,014,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115,635,801.25	124,179,494.12	
04 3 09	PERHUBUNGAN	5,641,761,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,845,585,975.25	4,488,494,403.00	

Lampiran V Peraturan Daerah  
 Nomor : 10 Tahun 2019  
 Tanggal : 5 Desember 2019

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG										BELANJA LANGSUNG	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANSOS	BELANJA BAGI HASIL KE PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	BELANJA BANTUAN KEU KE PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
04 3 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.965.447,654.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.911.561,554.00	121.499,606.00	
04 3 12	PENANAMAN MODAL	5.098.247,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.993.743,944.00	19.483,522.00	
04 4 03	PERTANIAN	23.245.551,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.209.949,375.11	748.231,612.00	
04 4 07	PERINDUSTRIAN	7.207.300,177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.034.453,206.56	251.300,000.00	
05	Lingkungan Hidup	4.878,733,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.783,569,451.58	696,556,000.00	
05 3 05	LINGKUNGAN HIDUP	4.878,733,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.783,569,451.58	696,556,000.00	
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	13.874,793,622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.729,634,043.88	73,164,652,567.26	
06 2 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.174,268,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.625,934,603.88	71,374,375,667.26	
06 2 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.700,525,179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.103,699,440.00	1.790,276,900.00	
07	Kesehatan	112.950,161,868.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.945,387,600.00	100,509,001,981.95	16,119,689,481.00	
07 2 02	KESEHATAN	108.811,492,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.945,387,600.00	98,579,082,612.95	16,119,689,481.00	
07 3 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.138,668,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,919,369.00	0.00	
08	Parwisata dan Budaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	Agama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Pendidikan	254,728,875,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105,420,523.00	78,110,089,514.62	26,108,433,287.73	
10 2 01	PENDIDIKAN	250,498,077,162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105,420,523.00	69,142,971,943.37	24,599,223,174.23	
10 3 13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.230,798,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,967,117,571.25	1,509,210,113.50	

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANSOS	BELANJA BAGI HASIL KE PROV KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	BELANJA BANTUAN KEU KE PROV KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Perindungan Sosial	18,168,838,352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,751,210,369.22	1,510,766,323.48
11 2 05	KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4,173,908,079.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907,596,298.50	808,612,742.48
11 2 06	SOSIAL	4,747,014,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,034,552.34	237,654,941.00
11 3 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,108,179,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,319,419.99	109,490,460.00
11 3 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,139,736,451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,260,098.39	355,008,180.00
	JUMLAH	637,704,284,554.75	0.00	0.00	44,547,999,159.00	230,000,000.00	4,380,147,513.00	251,558,876,035.00	500,000,000.00	23,050,808,123.00	386,289,454,370.85	147,748,419,637.40

BUPATI INDRAGIRI HULLU

H. YUPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTOR PUPA	

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

GOLONGAN	ESELON						NON ESELON		TOTAL
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

**PARAF KOORDINASI**

KARAG HUKUM	KEPALA DINAS .....
KEPALA BAGIAN .....	KEPALA BADAN/INSPEKTUR
KEPALA KANTOR/DIREKTUR .....	KEPALA KANTOR/DIREKTUR .....

**BUPATI INDRAGIRI HULLU**  
**H. YUPI ARIANTO**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu  
 Nomor :  
 Tanggal : 31 Desember 2019

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang		Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Tahun
		3	4				
1	Pajak Daerah	31 Desember 2018	48,987,518,983.15	-	3,755,914,531.79	45,231,604,451.36	
2	Retribusi Daerah	31 Desember 2018	8,099,904,398.25	-	1,593,750.00	8,098,310,648.25	
3	Lain-lain	31 Desember 2018	-	-	-	-	
4	Retribusi BLUD	31 Desember 2018	-	-	-	-	
<b>J U M L A H</b>			<b>57,087,423,381.40</b>		<b>3,757,508,281.79</b>	<b>53,329,915,099.61</b>	

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KAGAG HUKUM	stop	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	/
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR .....	

**BUPATI INDRAGIRI HULU**  
  
**H. YOPi ARIANTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No. Penyer-taan Modal	Tahun	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang Telah disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyer-taan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Akan Diterima Kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2004	Riau Air Lines	Sertifikat Saham Nomor 35001-35500/RAL/2005, Tanggal 1 Agustus 2005	Saham	500.000.000,00	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
2	2008	Perusahaan Daerah	PERDA No. 1 Tahun 2007, Dan sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca PDAM Tirta Indra Per tanggal 31 Desember 2014	Saham	48.719.236.144,00	48.719.236.144,00	-	48.719.236.144,00	-	-	-	48.719.236.144,00
3	2014	Bank Riau	Perda No:15 Tahun 2014	Saham	20.000.000.000,00	6.400.700.000,00	-	6.400.700.000,00	13.599.300.000,00	2.168.057.484,00	-	6.400.700.000,00
4	2014	BPR Indra Arta Rengat	Perda No. 9 Tahun 2011	Bagi Hasil	20.000.000.000,00	12.141.832.069,00	3.300.000.000,00	15.441.832.069,00	4.558.167.931,00	149.414.000,00	-	15.441.832.069,00
5	2015	PDAM Tirta Indra	Perda No. 8 Tahun 2014, Dan sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca PDAM Tirta Indra Per tanggal 31 Desember 2014	Hibah	5.000.000.000,00	21.072.468.003,93	-	21.072.468.003,93	-	-	-	21.072.468.003,93
<b>J U M L A H</b>												
								102.134.236.217				102.134.236.216,93

**PARAF KOORDINASI**

KARAG HUKUM

KETAPALA BAGIAN

KEPALA DINAS

KEPALA BADAN/INSPEKTUR

KEPALA KANTON/DIREKTUR RSUD


**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**


**H. YUPI ARIANTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1.	Tanah	635,670,548,795.64	-	-	635,670,548,795.64
2.	Peralatan dan Mesin	389,031,479,077.06	2,977,205,800.00	-	392,008,684,877.06
3.	Gedung dan Bangunan	1,304,253,561,227.89	2,563,644,187.97	-	1,306,817,205,415.86
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,589,346,486,698.96	4,321,522,803.61	-	1,593,668,009,502.57
5.	Aset tetap lainnya	20,629,819,324.33	-	-	20,629,819,324.33
6.	Konstruksi Dalam pengerjaan	15,055,810,813.93	564,126,000.00	-	15,619,936,813.93
<b>J U M L A H</b>		<b>3,953,987,705,937.80</b>	<b>10,426,498,791.58</b>	<b>-</b>	<b>3,964,414,204,729.38</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR SSUD	

**BUPATI INDRAGIRI HULLU**  
  
**H. YOPRIANTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hullu  
 Nomor : 10 Tahun 2019  
 Tanggal : 31 Desember 2019

NO	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	2				
1	ASET TIDAK BERWUJUD	6,009,603,760.60	-	-	6,009,603,760.60
2	ASET LAIN - LAIN	81,806,913,585.97	-	-	81,806,913,585.97
	<b>J U M L A H</b>	<b>87,816,517,346.57</b>			<b>87,816,517,346.57</b>

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA KANTOR/DIREKTUR ASUH		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

**BUPATI INDRAGIRI HULLU**

**H. YOPRI ARIANTO**

*[Handwritten mark]*

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN**  
**DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019			JUMLAH AKUMULASI REALISASI S/D AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8
JUMLAH							

**N I H I L**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS .....	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

**BUPATI INDRAGIRI HULLU**  
*[Signature]*  
**H. YUPI ARIANTO**

*[Signature]*

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu  
 Nomor : 10 Tahun 2019  
 Tanggal : 31 Desember 2019

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer Ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>- N I L I L -</b>								
<b>J U M L A H</b>								

DABAE KOORDINASI		DABAE KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Yop</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<input checked="" type="checkbox"/>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR BUD	

**BUPATNDRAGIRI HULLU**


**H. YUPI ARIANTO**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**  
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hullu  
 Nomor : 10 Tahun 2019  
 Tanggal : 31 Desember 2019

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>- N I L I L -</b>											
<b>J U M L A H</b>											

<b>PARAF KOORDINASI</b>			
KABAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	(
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

**BUPATI INDRAGIRI HULLU**  
  
**H. YUPI ARIANTO**